

Kejati Akan Tangani Setiap Pengaduan

PLEBURAN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng mengaku tidak menangani kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan perpustakaan dan gedung dosen Fakultas Hukum Undip Semarang senilai sekitar Rp 26,9 miliar. Kepala Kejati Jateng, Hartadi menyatakan, belum ada laporan mengenai kasus yang diduga melibatkan pejabat FH Undip tersebut.

"Nggak (tangani-red). Belum ada (laporan-red)," kata Kajati didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidus), Masyhudi kepada wartawan, kemarin.

Kajati mengatakan, pihaknya akan menerima dan menindaklanjuti setiap pengaduan serta laporan yang masuk terkait dugaan korupsi yang terjadi.

"Kalau ada info, sampaikan ke kami dengan lampiran bukti-bukti. Jangan laporan saja," kata Hartadi.

Kajati menegaskan, korupsi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah lewat aparat penegak hukum dan masyarakat. "Korupsi tugas keseluruhan dan tanggungjawab bersama-antar msayarakat dan aparat," lanjutnya.

Setahun lebih lalu, Oktober 2013 masyarakat mengatasnamakan Masyarakat Peduli Pendidikan Tinggi Hukum menggelar aksi atas dugaan *mark up* dana pada pembangunan gedung di Undip Semarang. Mereka mengadukan dugaan kasus itu ke Kejati Jateng dan Polda Jateng.

Menurut mereka, proyek tahun 2012 itu diindikasikan terjadinya pelembungan dana. Dari dana sekitar Rp 26 miliar, sekitar Rp 4 miliar dinilai hilang akibat dikorupsi.

Mengacu pada temuan audit BPK tahun 2013, dikatakan bangunan sudah cacat, tidak layak, beberapa sudah rusak. Sejumlah pejabat kampus yang dituding terlibat, Dekan FH Prof Dr Yos Johan Utama SH dan Pembantu Dekan II Untung Dwi Hananto SH MH.

■ Membantah

Dikonfirmasi perihal itu, Prof Yos Johan Utama membantah adanya korupsi pada di kampus yang dipimpinnya. "Semua pengadaan jasa sudah sesuai prosedur yang benar. Mulai dari sistem lelang, lalu ada sanggahan hingga ke pengadaan semua sudah sesuai aturan," ungkapnya.

Prof Yos sebelumnya menjelaskan, pagu anggaran untuk gedung seluas 8.611 m² itu sebesar Rp 30 miliar dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 29 miliar.

Pengadaan telah dilakukan lewat prosedur lelang sebagai ketentuan. Dari peserta yang mendaftar sekitar 48 perusahaan namun hanya enam yang dinyatakan lolos. ■ *rdi-Yn*